LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2018

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Jl. Sudirman Nomor 27-29 Bukittinggi Telp/Fax. 0752 23976

DAFTAR ISI

		halaman
DAFTAR ISI	.....	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM SKPD	3
	A. Visi dan Misi SKPD	3
	B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	3
	C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4
	D. Kepegawaian & Sarana dan Prasarana SKPD	4
	E. Sarana dan Prasarana SKPD	5
BAB III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7
	A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD	7
	B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD	20
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	21
	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	21
	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	21
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	22
	A. KERJASAMA ANTAR DAERAH	22
	B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	22
	C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL	22
	D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH	23
	E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	23
	F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.....	23
	G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23
BAB VI	PENUTUP	24

LAMPIRAN

III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

III.2.DAFTAR NOMINATIF/ BEZZETING PNS PER DESEMBER 2017

III.3 KARTU INVENTARIS BARANG DESEMBER 2017

III.4 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan guna menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Melihat pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan hasil evaluasi Pemerintah Daerah terhadap dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD tersebut akan dievaluasi oleh Pemerintah dan kemudian akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan, penganggaran serta penyusunan kebijakan terkait kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, maka Walikota Bukittinggi berkewajiban menyusun dan menyampaikan LPPD Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah. Dalam rangka mendukung penyusunan LPPD Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, dibutuhkan bahan dan dokumen pendukung dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pelaksana program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

Bukittinggi juga melaksanakan penyusunan LPPD berbasis Program dan Kegiatan SKPD.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM SKPD

A. Visi dan Misi SKPD

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu: ***Terwujudnya Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Bukittinggi Yang Demokratis.***

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam misi Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittiggi.
2. Memantapkan nilai-nilai kesatuan bangsa.
3. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan santun.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittiggi.
2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan ketahanan bangsa melalui penguatan pengamalan pilar kebangsaan.
4. Memantapkan stabilitas politik Kota Bukittinggi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatknya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittiggi.
2. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan.
3. Terpeliharanya ketahanan ipoleksosbudhankam.
4. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
2. Menciptakan budaya kerja yang professional.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
6. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat

Sebagaimana pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2. Melaksanakan manajemen pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan
3. Melengkapi sarana dan prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan standar sarana dan prasarana
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
8. Melaksanakan kegiatan antisipasi/ deteksi dini potensi konflik masyarakat
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik masyarakat
6. Meningkatkan peran oragnisasi kemasyarakatan, LSM dan pihak terkait lainnya
7. Meningkatkan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders lainnya

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

D. Kepegawaian SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,

dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang, dengan rincian Kepala Kantor (eselon IIIa) 1 orang, Kasubag Tata Usaha (eselon IVa) 1 orang, Kepala Seksi (eselon IVa) 3 orang dan fungsional umum sebanyak 10 orang. Rincian daftar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat dilihat pada lampiran III.2.

E. Sarana dan Prasarana SKPD

selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada lampiran III.3.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bukittinggi diarahkan guna mewujudkan suasana kota yang kondusif dan stabil serta kehidupan masyarakat yang demokratis.
Dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi melaksanakan 9 (Sembilan) program dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.4.074.495.895,- dan dapat teraealisasi sebesar Rp. 3.694.156.980,- (90.67%) dengan rician sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya sistem administrasi perkantoran tertib dan lancar

Program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan program rutin dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan : Tersedianya jasa surat menyurat dalam rangka menyediakan bahan pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.2.099.000,-	Rp.2.099.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya Materai dan Buku Cek	470 lembar materai 2 buku cek	22 lembar materai 2 buku cek

Hasil	Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	100%	100%

Permasalahan : -

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tujuan : Tersedianya Jasa Komunikasi pelayanan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi dan Informasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.30.160.000,-	Rp.23.776.934,-
Output/ Keluaran	Tagihan telepon dan speedy	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya Komunikasi Perkantoran	100%	78.84%

Permasalahan : -

Kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena pembayaran tagihan telepon dan internet sesuai dengan tagihan

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tujuan : Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang bertujuan terpeliharaanya kendaraan Dinas untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.52.584.000,-	Rp.44.075.350,-
Output/ Keluaran	Kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit kendaraan dinas roda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 2	1 unit kendaraan dinas roda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 2
Hasil	Kendaraan dinas beroprasi dengan baik	100%	83.82%

Permasalahan : Kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan efesiensi.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tujuan : Tersedianya Jasa kebersihan kantor untuk terjaganya kebersihan kantor dan peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 38.700.000,-	Rp.38.686.120,-
Output/ Keluaran	Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya lingkungan kantor	100%	99.96%

	yang bersih dan nyaman		

Permasalahan : -

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tujuan : Tersedianya Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.860.000,-
Output/ Keluaran	Komputer/laptop/ printer yang dipelihara	5 unit komputer, 8 unit laptop, 5 unit printer,2 unit air purevire, 1 unit AC 2 unit TV	5 unit komputer, 8 unit laptop, 5 unit printer,2 unit air purevire, 1 unit AC 2 unit TV
Hasil	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	100%	97.20%

Permasalahan : -

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tujuan : Tersedianya Alat Tulis Kantor bertujuan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.14.576.700,-	Rp.14.576.700,-
Output/ Keluaran	Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket
Hasil	Terpenuhinya alat tulis kantor	100%	100%

Permasalahan : -

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tujuan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan guna peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 10.010.000,-	Rp. 10.008.500,-
Output/ Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 macam barang cetak dan 12 bulan penggandaan.	4 macam barang cetak dan 12 bulan penggandaan.
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	99.99%

Permasalahan : -

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dilaksanakan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

ndikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.1.405.000,-	Rp.1.405.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	8 macam	8 macam
Hasil	Fasilitas penerangan kantor yang memadai	100%	100%

Permasalahan : -

9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tujuan : Terfasilitasi Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas dengan baik

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 8.470.000,-	Rp. 7.233.200,-
Output/ Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman	130 bungkus makan 40 porsi minum 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang ka.kan	130 bungkus makan 40 porsi minum 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang ka.kan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	85.40%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan efesiensi.

10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Perjalanan dinas dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 164.500.000,-	Rp. 155.613.100,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya informasi yang bisa ditindaklanjuti	100%	94.60%

Permasalahan : -

11. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Tujuan : Terlaksananya Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan guna peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 7.592.420,-	Rp.7.170.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya Honor bagi PPK, PPBJ dan PPHP	1 paket	1 paket
Hasil	Terpenuhinya honor bagi PPK, PPBJ dan PPHP	100%	94.44%

Permasalahan :

II. Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masayarakat

Sasaran : Sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Tujuan : Pengadaan peralatan kantor dilaksanakan untuk peningkatan kenyamanan kerja aparatur

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.15.000.000,-	Rp.14.200.000,-
Output/ Keluaran	Jenis perlengkapan kantor terbeli	1 unit computer 1 unit printer	1 unit computer 1 unit printer
Hasil	Aparatur bekerja dengan baik dan maksimal	100%	94.67%

Permasalahan : -

III. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Tujuan : Terpeliharanya stabilitas serta keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam proses pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi terjadinya konflik

1. Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah

Tujuan : Terlaksananya Operasionalisasi Kominda dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*

Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 384.500.000,-	Rp. 344.550.800,-
Output/ Keluaran	Laporan operasional Kominda	12 laporan	12 laporan
Hasil	Tersedianya bahan dalam penyusunan kebijakan Kepala daerah	100%	98.87%

Permasalahan :

2. Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

Tujuan : Terlaksananya pemantauan kegiatan Orang Asing , Lembaga Asin dan Non Goverment Organization di Kota Bukittinggi dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 7.812.000,-	Rp. 0,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil pemantauan	3 kasus	Laporan bulanan
Hasil	Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	0 %

Permasalahan : Pencairan dana dari kegiatan ini dilaksanakan apabila terjadi kasus tentang pengawasan orang asing dan kegiatan ini secara fisik dilakukan yaitu dengan adanya laporan pengawasan bulanan.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Sosial

Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dari gangguan keamanan dari dalam Negri .

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 9.100.500,-	Rp. 0,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya laporan Konflik Sosiali	1 berkas	1 berkas
Hasil	Adanya rencana aksi penanganan Konflik Sosial	100%	0 %

Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan numun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efesiensi anggaran.

4. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi / Izin Penelitian dan Keramaian.

Tujuan : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam hal terbitnya rekomendasi tersebut di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.9.936.500,-	Rp.5.266.200,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil	24 laporan	24 laporan
Hasil	Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	53%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan efesiensi.

5. Kegiatan Operasional SATGAS SABER Pungli

Tujuan : Terlaksananya Operasional SATGAS SABER Pungli dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.93.804.000,-	Rp.43.266.500,-
Output/ Keluaran	Laporan kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan Satgas Saber Punli.	100%	46.12%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

IV. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi Wawasan Kebangsaan

Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan koordinasi Pemantapan Idiologi Wawasan Kebangsaan di Kota Bukittinggi.

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.16.135.000,-	Rp.16.135.000,-
Output/ Keluaran	Laporan peserta sosialisasi	150 orang	124 orang
Hasil	Meningkatnya Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	82%	100 %

Permasalahan :

2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Tujuan : Terlasananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara guna meningkatnya pemahaman akan kesadaran dalam membela Negara

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.28.503.800,-	Rp.19.413.000,-
Output/ Keluaran	Peserta penyuluhan peningkatan Bela Negara	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Peningkatan kesadaran tentang Bela Negara	100%	68.11%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

V. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya tatanan kehidupan demokrasi di Kota Bukittinggi

Sasaran : Meningkatnya pendidikan dan kesadaran politik di tengah – tengah masyarakat di Kota Bukittinggi

1. Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksannya Forum diskusi politik dilaksanakan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.2.411.999.675,-	Rp.2.335.824.151,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil Forum Diskusi Politik	24 laporan	24 laporan
Hasil	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Kepala daerah	100%	96.45%

Permasalahan : -

2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Tujuan : Terlaksananya Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dilaksanakan guna memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.3.190.000,-	Rp.2.155.900,-
Output/ Keluaran	Berita Acara	10 Parpol	10 Parpol

	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol		
Hasil	Lengkapnya syarat pencairan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	67.58%

Permasalahan : Rendahnya realisasi dari target yang ditetapkan pada kegiatan ini karena proses verifikasi dilaksanakan berdasarkan hasil rekomedasi dari BPK terkait pertanggungjawabaan bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun sebelumnya

3. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan : Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan pelaksanaan pembinaan Ormas yang terdaftar di Kota Bukittinggi berkaitan dengan hak dan kewajibannya serta memfasilitasi pendaftaran ormas

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.20.243.500,-	Rp.18.341.200,-
Output/ Keluaran	Laporan pembinaan Ormas dan SKTO Ormas/LSM	12 Ormas	12 Ormas
Hasil	Terlaksananya pembinaan ormas dan pendaftaran ormas	100%	90.60%

Permasalahan

4. Kegiatan Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuanan Partai Politik

Tujuan : Terlaksananya Bintek Pertangungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bukittinggi .

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 27.885.000,-	Rp.22.589.550,-
Output/ Keluaran	Peserta Bimtek	40 Orang	25 Orang
Hasil	Terselenggaranya Bimtek Pertanggungjawaban Bantuan Keuanan kepada Partai Politik	63%	81.01%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan tidak maksimalnya kehadiran peserta Bimtek dan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik

Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bertujuan guna peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.12.190.000 ,-	Rp. 10.329.600,-
Output/ Keluaran	Peserta Sosiaslisasi	50 orang	40 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang politik dsb	100%	84.74%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Kegiatan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Verifikasi dan Pemutakhiran data Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk dapat tertatanya Ormas yang ada di Kota Bukittinggi.

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 6.178.800,-	Rp. 3.877.400,-
Output/ Keluaran	Laporan Verifikasi dan Pemutakhiran data Ormas/LSM	40 Eks	40 Eks
Hasil	Terlaksananya Verifikasi dan Pemutakhiran data Ormas dan LSM	100%	62.75%

Permasalahan: Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat

Tujuan : Terlaksananya Peningkatan kesadaran politik dan organisasi masyarakat dilaksanakan guna meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.14.366.700,-	Rp.14.366.700,-
Output/ Keluaran	Peserta peningkatan kesadaran berpolitik	100 orang	92 orang

Hasil	Meningkatnya pemahaman peserta tentang kesadaran berpolitik	92 %	100 %

Permasalahan : .

VI. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari – Hari Besar

1. Kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya .

Tujuan : Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.12.490.000,-	Rp.4.262.500,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	34.13%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.

VII. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

1. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada

Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada bertujuan guna peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pemilu/pilkada.

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.94.492.300,-	Rp.32.957.300,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	1 laporan	1 laporan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	34.88%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan

2. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada

Tujuan : Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan yang bertujuan Pemilu dan Pilpres berjalan aman, damai dan lancar di Kota Bukittinggi.

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.308.361.000,-	Rp.262,928,650,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	8 laporan	8 laporan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	85.27%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama.

Tujuan : Terpeliharanya Kerukunan antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

Sasaran : Mencegah terjadinya konflik intern / antar umat beragama di tengah – tengah masyarakat

I. Kegiatan Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 178.205.500,-	Rp.124.087.025,-
Output/ Keluaran	Laporan sosialisasi dan Razia	210 orang	202 orang
Hasil	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan Razia.	100%	69.63%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Pembinaan kerukunan umat beragama yang berguna meningkatkan toleransi antar umat beragama dan bebas konflik intern / antar umat beragama di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*

Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.3.780.000,-	Rp.2.001.600,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil pemantauan	1 laporan	1 laporan
Hasil	Meningkatnya Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	52.95%

Permasalahan : -

IX. Program Pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba.

Tujuan : Terciptanya Kota Bukittinggi bersih dari penyakit masyarakat

Sasaran : Terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat

1. Kegiatan Pembekalan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Tujuan : Terlaksananya Pembekalan Penangulangan dan Peredaran Gelap narkoba Penyuluhan bertujuan untuk mencegah peredaran dan penggunaan miras dan narkoba di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 18.764.500,-	Rp. 18.764.600,-
Output/ Keluaran	Peserta Pembekalan Penanggu langan Penyalah gunaan Narkoba	120 orang	120 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang bahaya miras dan narkoba	100%	100%

Permasalahan :

2. Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkoba (Kompani) Kota Bukittinggi.

Tujuan : Terlaksananya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkoba bertujuan untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkoba di Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 43.138.000,-	Rp. 40.089.500,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya operasionalisasi Kompani	1 lapora	1 Lapora
Hasil	Meningkatnya Peranan Pemuda untuk pencegahan	100%	92,93%

	peredaran Narkoba		

Permasalahan :

3. Kegiatan Test Urine bagi ASN di Lingkunan Kota Bukittingi.

Tujuan : Terlaksananya Test Urine bagi ASN di Lingkungan Pemda Kota Bukittinggi

Indikator	*Tolok Ukur Kinerja*	*Target Kinerja*	*Realisasi*
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 55.322.000,-	Rp. 49.246.000
Output/ Keluaran	Laporan Pemeriksaan Test Urine ASN Pemda Kota Bukittinggi	600 Oang	600 Orang
Hasil	Terlaksananya kegiatan Test Urine bagi ASN Pemda Kota Bukittinggi	100%	89.02%

Permasalahan :

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD (*Tidak Ada*)

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (*Tidak Ada*)

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (*Tidak Ada*)

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH (*Tidak Ada*)

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (*Tidak Ada*)

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam beberapa kegiatan sebagai berikut

1). Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memonitoring kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO, Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Bukittinggi, Kepolisian Resor Bukittinggi, Kodim 0304 Agam serta Kejaksanaan Negeri Kota Bukittinggi.

2). Forum Pemantapan Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan Pemantapan Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan guna meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

3). Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah

Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah yang bertujuan guna mendeteksi potensi gangguan keamanan di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kantor Imigrasi Kota Bukittinggi serta Kejaksanaan Negeri Kota Bukittinggi

4). Koordinasi Forum Diskusi Politik

Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik yang bertujuan guna memberikan masukan kepada Kepala daerah dalam menyusun kebijakan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kejaksanaan Negeri Kota Bukittinggi, Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi serta Pengadilan Agama Kota Bukittinggi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan yang berkoordinasi dengan instansi vertikal dapat terealisasi dengan baik.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan instansi vertikal tidak ditemui permasalahan yang dihadapi.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (*Tidak Ada*)

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (*Tidak Ada*)

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS (*Tidak Ada*)

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (*Tidak Ada*)

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah kepada Pemerintah yang berisikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, maka Walikota Bukittinggi berkewajiban menyampaikan LPPD penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah. Dalam rangka mendukung penyusunan LPPD Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri juga melaksanakan penyusunan LPPD berbasis penyelenggaraan urusan Pemerintaha Daerah.

Semoga dengan LPPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini dapat melengkapi penyusunan LPPD Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Bukittinggi, Januari 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ALDIASNUR , M.Si
NIP. 197208161993031006